



Good Corporate Governance dan Kinerja Finansial Bank: Studi Empiris pada Emiten Perbankan di BEI (2021–2023)

M. Irgi Sepri Saswandi ^{1*}, Syarbini Ikhsan ², dan Rusliyawati ³

¹ Universitas Tanjungpura; Pontianak, Kalimantan Barat; e-mail : whyjawai@gmail.com

² Universitas Tanjungpura; Pontianak, Kalimantan Barat; e-mail : syarbiniikhsan62@gmail.com

³ Universitas Tanjungpura; Pontianak, Kalimantan Barat; e-mail : rusliyawati@ekonomi.untan.ac.id

* Corresponding Author : M. Irgi Sepri Saswandi

Abstract: This study is intended to examine the influence of Good Corporate Governance (GCG) practices on the financial outcomes of banks listed on the IDX throughout the 2021–2023 timeframe. GCG is measured using three main indicators: the presence of an audit committee, the proportion of independent commissioners, and institutional ownership. Financial performance is proxied by Return on Equity (ROE). A quantitative approach and explanatory research method are employed, with data collected through purposive sampling from 47 banks that meet the selection criteria. Testing between variables was conducted using multiple linear regression analysis techniques. The results reveal that the proportion of independent commissioners has a significant positive impact on ROE, while institutional ownership exerts a significant negative influence. Meanwhile, the audit committee variable does not have a statistically significant effect on financial performance. These findings reinforce the relevance of agency theory in the context of corporate oversight and accountability. They also highlight the importance of ownership structure and independent supervision in enhancing the efficiency of equity capital utilization. This research provides practical implications for bank management, regulators, and stakeholders in formulating more effective GCG policies aimed at promoting sustainable financial performance in Indonesia's banking sector.

Keywords: Good Corporate Governance; Banking; Return on Equity; Financial Performance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap aspek kinerja finansial perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. GCG dalam penelitian ini diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu keberadaan komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional, sementara kinerja keuangan diprosikan dengan Return on Equity (ROE) menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode explanatory research, data diperoleh melalui teknik purposive sampling dari 47 bank yang memenuhi kriteria seleksi. Pengujian antar variabel dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menguatkan relevansi teori keagenan dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas perusahaan, serta menekankan pentingnya struktur kepemilikan dan independensi pengawasan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi manajemen bank, regulator, dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan GCG yang lebih efektif guna mendorong kinerja finansial yang berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Perbankan; Pengembalian Ekuitas; Kinerja Keuangan

Received: June 14, 2025

Revised: June 18, 2025

Accepted: July 12, 2025

Published: July 14, 2025

Curr. Ver.: July 14, 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Salah satu tantangan utama dalam industri perbankan modern adalah menjaga integritas dan efektivitas sistem tata kelola internal, terutama dalam aktivitas inti seperti pemberian kredit. Proses pemberian kredit yang kompleks menuntut adanya sistem kontrol yang ketat, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan internal, kualitas audit, serta mekanisme manajemen risiko dapat meningkatkan potensi terjadinya kegagalan operasional, penurunan kinerja keuangan, hingga terganggunya stabilitas kepercayaan pemangku kepentingan (Zahra & PearceII, 1989). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi semakin esensial untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional bank berjalan secara akuntabel dan profesional. Pada awal tahun 2025, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengungkap dugaan korupsi di Bank Jatim Cabang Jakarta dengan nilai kerugian mencapai Rp569 miliar. Kasus ini bermula dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Jatim yang menemukan adanya penyimpangan dalam pemberian kredit. Modus operasi yang digunakan melibatkan pemberian kredit fiktif kepada debitur yang tidak memenuhi syarat, serta manipulasi data dan dokumen pendukung kredit. Praktik ini menunjukkan kelemahan dalam implementasi prinsip-prinsip GCG, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal (Nugroho, 2025). Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan GCG yang efektif dalam operasional bank, terutama dalam proses pemberian kredit yang merupakan salah satu fungsi utama bank. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank, menurunkan kepercayaan publik, dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.

Namun demikian, pengaruh setiap komponen GCG terhadap kinerja keuangan tidak selalu seragam. Komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA bank, sementara pengaruh dewan komisaris independen bervariasi tergantung pada struktur kepemilikan dan skala bank (Indra, Putra, Soehaditama, et al., 2024). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas GCG sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan operasional masing-masing bank. Kinerja finansial perbankan Indonesia dalam kurun waktu 2021–2023 juga menunjukkan dinamika yang menarik. Terjadi pemulihan signifikan pasca pandemi COVID-19, yang ditandai dengan peningkatan laba bersih dan efisiensi operasional sebagian besar bank besar seperti BRI dan BCA, yang juga dikenal memiliki sistem GCG yang kuat (Indra, Putra, Machdar, et al., 2024). Sementara itu, topik GCG dalam konteks perbankan masih menjadi perhatian utama dalam literatur akademik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan efisiensi manajemen risiko, peningkatan profitabilitas, dan pengendalian internal (Krismaya et al., 2024). Namun, tidak semua penelitian mendukung pengaruh positif GCG terhadap kinerja keuangan. Beberapa studi menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak signifikan. Misalnya, penelitian oleh (Fazila et al., 2024) menemukan bahwa dalam industri makanan dan minuman, dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, sementara komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian empiris lebih lanjut untuk memahami secara lebih dalam bagaimana implementasi GCG memengaruhi kinerja keuangan bank, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik tata kelola, budaya organisasi, dan regulasi yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara variabel-variabel utama GCG (komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional) terhadap kinerja keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mendefinisikan hubungan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) dalam suatu perusahaan. Hubungan keagenan terjadi ketika pemilik mendelegasikan wewenang pengelolaan kepada manajer, dan hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara keduanya. Ketika manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap daripada pemilik (asymmetric information), maka timbul risiko

manajemen bertindak demi kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dipandang sebagai teori yang menjelaskan bagaimana struktur tata kelola dapat dirancang untuk meminimalisasi biaya agensi, seperti biaya pengawasan dan biaya kegagalan manajer dalam bertindak sesuai kepentingan principal (Eisenhardt, 1989).

Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian di perusahaan publik menyebabkan kebutuhan atas sistem pengawasan yang kuat, salah satunya melalui implementasi Good Corporate Governance (GCG) (Fama & Jensen, 2019). Sistem insentif dan kontrol yang tepat dapat mengurangi moral hazard dari agen dan meningkatkan efisiensi organisasi (Alchian & Demsetz, 1972). Masalah ini muncul akibat ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pihak manajemen (agen), di mana agen memiliki akses informasi yang lebih baik terkait operasional perusahaan dibandingkan pemilik. Ketimpangan ini menciptakan potensi penyalahgunaan wewenang oleh agen untuk kepentingan pribadi, yang dalam literatur dikenal sebagai moral hazard. Dalam situasi ini, manajer dapat mengambil keputusan yang memaksimalkan kepentingan pribadinya, meskipun mengorbankan nilai jangka panjang perusahaan (Yadav & Yadav, 2025). Agency theory menjelaskan bahwa risiko moral hazard meningkat ketika kualitas pengawasan eksternal, seperti audit independen, rendah. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa keterlibatan auditor spesialis secara signifikan dapat mengurangi dampak asimetri informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat dalam mengontrol perilaku oportunistik manajemen (Kartikasary et al., 2024).

Struktur utang jangka panjang yang tidak terkelola dengan baik dapat mendorong manajer untuk bertindak tidak efisien dalam pengalokasian investasi karena kurangnya disiplin pasar. Studi mereka juga menemukan bahwa intensitas persaingan di pasar produk dapat menekan perilaku oportunistik manajemen dan memperbaiki efisiensi investasi melalui tekanan eksternal (Yadav & Yadav, 2025). Penelitian pada sektor perbankan di Tanzania yang menemukan bahwa penyebab utama tingginya kredit bermasalah (non-performing loans) adalah lemahnya pengawasan dewan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh adverse selection dan moral hazard. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tata kelola perusahaan yang lemah akan memperburuk konsekuensi konflik keagenan (Budotela, 2016).

Penerapan asuransi direksi dan pejabat (Directors and Officers Insurance) ternyata berkorelasi dengan persepsi risiko keagenan dan moral hazard. Perlindungan ini, bila tidak diimbangi pengawasan, dapat memperlemah akuntabilitas manajemen dan memicu perilaku menyimpang (Chang, 2024). Atribut komite audit dan auditor eksternal yang kuat memainkan peran sentral dalam mengurangi agency cost di negara-negara GCC. Studi ini mempertegas relevansi agency theory dalam berbagai sistem hukum dan budaya, terutama dalam mendeteksi praktik fraud, korupsi, dan konflik kepentingan (Aladwey & Diab, 2025).

Secara umum, teori keagenan mengajarkan bahwa manajer akan cenderung menghindari risiko dan memilih tindakan yang menguntungkan dirinya, kecuali jika terdapat mekanisme pengawasan dan insentif yang selaras. Oleh karena itu, untuk menekan biaya keagenan, perusahaan perlu menyeimbangkan antara monitoring expenditures yang dilakukan oleh prinsipal dan bonding expenditures yang diberikan oleh agen (Eisenhardt, 1989). Dalam konteks modern, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi sangat diperlukan sebagai instrumen pengendali terhadap perilaku agen yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan.

2.2 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip dan sistem tata kelola yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan seluruh pihak pemangku kepentingan. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), menjelaskan bahwa GCG merupakan seperangkat mekanisme yang berfungsi mengelola perusahaan guna menghasilkan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, manajemen, kreditur, dan masyarakat (FCGI, 2001). Bank Dunia juga mendefinisikan GCG sebagai

kerangka struktur yang meliputi strategi dan proses dalam memimpin serta mengatur jalannya perusahaan guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya terhadap pemegang saham dan publik (World Bank, 1999).

Dalam konteks perbankan, penerapan GCG menjadi sangat penting karena bank mengelola dana publik dalam jumlah besar dan rentan terhadap risiko sistemik. Penerapan GCG dapat memperkuat pengawasan internal, mengurangi peluang terjadinya fraud, dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan strategis (Claessens & Yurtoglu, 2013). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia juga telah menetapkan regulasi yang mewajibkan praktik GCG dalam industri jasa keuangan (OJK, 2020). Studi empiris menunjukkan bahwa komponen utama dari mekanisme GCG seperti komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berperan penting dalam memperbaiki kinerja keuangan bank. Misalnya, kehadiran komisaris independen dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik saham, sebagaimana yang dijelaskan dalam *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976).

Sementara itu, komite audit yang efektif berkontribusi dalam meningkatkan integritas pelaporan keuangan dan pengawasan terhadap pengendalian internal (Al-Matari et al., 2014). Kepemilikan institusional juga memberikan tekanan eksternal bagi manajemen untuk bertindak lebih efisien dan bertanggung jawab karena investor institusional memiliki motivasi lebih tinggi dalam melakukan pemantauan (Shleifer Andrei and Vishny, 1997). Namun, efektivitas dari tiap komponen GCG bisa bervariasi tergantung pada konteks kelembagaan dan karakteristik perusahaan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan kinerja keuangan tidak selalu signifikan atau bahkan negatif, tergantung pada sektor dan struktur organisasi yang diteliti (Fazila et al., 2024).

Dengan demikian, penerapan GCG bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan strategi penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan nilai perusahaan, dan memperkuat daya saing di pasar keuangan global.

2.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan fondasi penting dalam menciptakan perusahaan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai pedoman internasional untuk diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kondisi lokal suatu negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini telah banyak diadopsi oleh regulator dan perusahaan untuk memperkuat sistem pengawasan dan kepercayaan investor. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandiri (Dwiridotjahjono, 2009).

Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan menitikberatkan pada pentingnya perlakuan yang setara bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, tanpa adanya diskriminasi. Hal ini termasuk upaya melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dan asing agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak dengan kepemilikan dominan. Implementasi prinsip ini tercermin dalam perumusan kebijakan internal yang menjunjung tinggi kesetaraan hak, pengembangan kode etik perusahaan, serta pelaksanaan sistem kompensasi yang wajar. Di samping itu, prinsip ini juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi yang signifikan dan pemberian kesempatan kerja yang adil tanpa memandang latar belakang individu.

Transparansi (Transparency)

Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan relevan dalam proses menentukan arah kebijakan, khususnya dalam aspek strategis dan keuangan perusahaan. Pemegang saham berhak mendapatkan informasi akurat dan terkini agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Transparansi ini diwujudkan melalui penerapan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar terbaik, serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi untuk mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan oleh jajaran direksi dan dewan komisaris. Perusahaan juga wajib

mengembangkan sistem manajemen risiko guna mengidentifikasi dan mengendalikan risiko utama sesuai batas toleransi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan kejelasan fungsi, peran, dan tanggung jawab dari seluruh organ perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, setiap struktur organisasi—baik direksi, dewan komisaris, maupun unit pendukung seperti komite audit—harus memahami batasan kewenangan, hak, dan kewajiban masing-masing. Untuk menerapkan akuntabilitas secara efektif, perusahaan perlu membentuk komite audit yang berfungsi mendukung pengawasan dewan komisaris, serta memperkuat peran audit internal dengan mendefinisikan tugasnya secara eksplisit. Penyajian laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip dan ketentuan standar akuntansi dan dipublikasikan secara tepat waktu juga merupakan bagian penting dari penerapan prinsip ini.

Pertanggungjawaban (Responsibility)

Prinsip pertanggungjawaban menuntut adanya sistem tata kelola yang memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas seperti pemerintah, masyarakat, dan asosiasi industri. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta sosial. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat memicu sanksi hukum dan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan, sehingga tanggung jawab ini menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik.

Kemandirian (Independence)

Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan secara profesional yang bebas dari campur tangan pihak eksternal yang memiliki kepentingan pribadi. Kemandirian berarti bahwa setiap pengambilan keputusan, terutama oleh dewan direksi dan dewan komisaris, harus didasarkan pada objektivitas dan integritas tanpa pengaruh dari pihak manapun. Aspek-aspek utama dari prinsip ini mencakup perlindungan hak pemegang saham, perlakuan setara, pengakuan terhadap kontribusi pemegang saham, penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat, serta pelaksanaan tanggung jawab oleh dewan secara menyeluruh. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor, manajer, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan tata kelola perusahaan yang independen dan sehat.

2.4 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan seperangkat sistem atau langkah strategis yang diterapkan oleh suatu entitas bisnis untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara efisien dan terarah. Penerapan mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengendalian terhadap operasional internal guna mencapai hasil yang optimal bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan, dengan orientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, mekanisme tata kelola perusahaan dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu keberadaan komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

Komite Audit

Komite audit merupakan suatu tim yang dibentuk dan diberi mandat oleh dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sistem pengendalian internal serta pelaksanaan audit di lingkungan perusahaan. Keberadaan komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota aktif selama periode tertentu. Peran utama dari komite ini adalah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan oleh dewan komisaris serta memberikan kontribusi objektif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2001 menyebut bahwa komite audit diposisikan di bawah koordinasi komisaris independen dan umumnya terdiri dari satu anggota dewan komisaris serta dua ahli dari lingkungan BUMN. Komite ini

diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

Menurut Ikatan Auditor Indonesia, komite audit dibentuk dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan profesional. Komite ini memiliki fungsi penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, pelaksanaan audit, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, komite audit memiliki sejumlah tanggung jawab utama yang mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip GCG, antara lain:

1. Mengawasi jalannya penerapan tata kelola perusahaan untuk menjamin kelancarannya.
2. Menilai komitmen manajemen puncak dalam mendukung dan menerapkan nilai-nilai tata kelola yang baik.
3. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kode etik serta pedoman perilaku yang telah ditetapkan.
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat berdampak terhadap kinerja suatu perusahaan, baik itu dari sisi finansial maupun non-finansial.
5. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mendorong auditor internal untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap tata kelola dan menyampaikan temuan penting lainnya secara tertulis.

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar struktur perusahaan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang tertuang dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Individu yang menjabat sebagai komisaris independen diangkat melalui hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhubungan finansial, kepengurusan, maupun kekerabatan dengan anggota dewan komisaris lainnya. Hal ini dimaksudkan agar komisaris independen dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan fokus sepenuhnya pada kepentingan perusahaan tanpa intervensi dari pihak internal (OJK, 2016)

Tujuan utama dari keberadaan komisaris independen adalah memberikan pengawasan terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Komisaris independen juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta menilai kebijakan dan tindakan manajemen, sekaligus memberikan masukan strategis jika diperlukan. Peran ini ditegaskan dalam Code of Good Corporate Governance yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang menyatakan bahwa komisaris independen harus bertindak untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham serta menjamin adanya prinsip keadilan dalam praktik tata kelola perusahaan (KNKG, 2006)

Adapun dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2016 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Perusahaan Efek, dijelaskan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai komisaris independen, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan perusahaan rentang waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat.
2. Tidak memiliki saham di perusahaan efek, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bebas dari afiliasi dengan perusahaan, termasuk dengan dewan komisaris, direksi, maupun pemegang saham pengendali.
4. Tidak memiliki hubungan bisnis, langsung ataupun tidak langsung, yang berkaitan dengan aktivitas usaha perusahaan efek.

Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara netral, memberikan pengawasan yang berkualitas, dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah kondisi di mana saham pada suatu perusahaan dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan lembaga investasi lainnya. Pemegang saham institusional umumnya memiliki sumber daya, kapasitas analisis, serta kepentingan jangka panjang terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, kehadiran kepemilikan institusional merupakan komponen penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) karena dapat memberikan tekanan positif terhadap manajemen untuk bertindak secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab (Shleifer Andrei and Vishny, 1997). Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tata kelola perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengungkapkan praktik tata kelola yang baik (Dewayanto et al., 2020).

Namun beberapa penelitian sebelumnya telah mengevaluasi peran kepemilikan institusional dalam memengaruhi nilai pasar perusahaan, namun hasilnya beragam. Salah satunya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh yang signifikan terhadap nilai pasar perusahaan di sektor barang konsumsi primer (Adinegara & Herliansyah, 2023). Hal ini menggambarkan bahwa peran kepemilikan institusional dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan konteks perusahaan. Penelitian oleh Susanto (2024) juga menyoroti bahwa kepemilikan institusional, bersama dengan kepemilikan asing, berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan dewan komisaris sebagai variabel moderasi. Ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan saling berinteraksi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan manufaktur. Namun, ketika dimoderasi oleh ukuran perusahaan, pengaruh tersebut menjadi lebih kuat, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat peran kepemilikan institusional dalam mengurangi risiko kebangkrutan (Linanda et al., 2024). Secara keseluruhan, kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas manajemen. Namun, efektivitasnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti sektor industri, ukuran perusahaan, dan kondisi ekonomi makro.

2.5 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan ukuran penting yang digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk menghasilkan keuntungan serta mempertahankan kesinambungan usaha. Evaluasi terhadap kinerja keuangan biasanya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasional dalam periode tertentu. Indikator yang umum digunakan antara lain Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) (Kasmir, 2018). Kinerja keuangan dapat menunjukkan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan melalui berbagai aktivitasnya. Kinerja ini juga memberikan gambaran tentang seberapa baik manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, kinerja keuangan tidak hanya menjadi perhatian internal manajemen, tetapi juga menjadi fokus utama investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi (Harahap, 2016).

Dalam konteks penelitian ini, kinerja keuangan diposisikan sebagai salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menjalankan aktivitas bisnisnya secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan mencerminkan pencapaian perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dari sisi operasional, investasi, maupun pembiayaan. Evaluasi terhadap kinerja keuangan biasanya dilakukan dengan menelaah laporan keuangan sebagai dasar analisis, dengan menggunakan rasio-rasio keuangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengukuran kinerja keuangan menjadi penting karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang saham serta mempertahankan keberlanjutan usahanya. Di samping itu, kinerja keuangan juga menjadi refleksi dari efektivitas kebijakan manajemen dan

implementasi tata kelola perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola perusahaan yang diterapkan, maka semakin besar pula peluang bagi perusahaan untuk mencatatkan hasil keuangan yang positif dan stabil dalam jangka panjang.

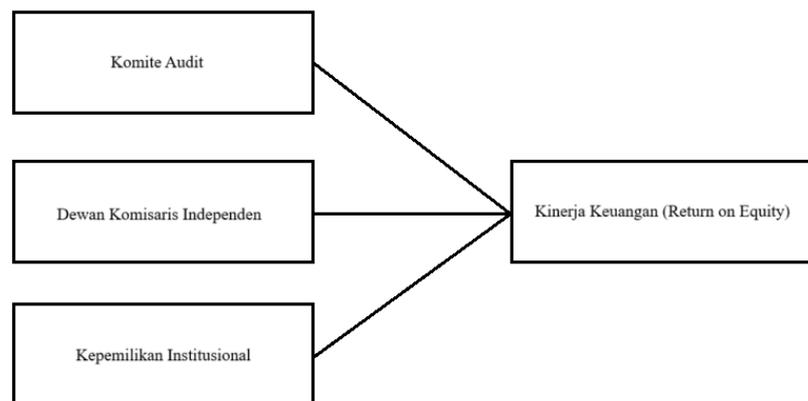
2.6 Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) digunakan sebagai indikator utama dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. ROE mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari setiap satuan ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. Dengan kata lain, ROE menggambarkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2018). ROE dianggap sebagai ukuran yang relevan dalam menilai pencapaian finansial perusahaan karena indikator ini tidak hanya memperlihatkan profitabilitas, tetapi juga efisiensi pemanfaatan dana yang dipercayakan oleh pemilik. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan berkelanjutan (Hery, 2021).

Dalam konteks Good Corporate Governance, ROE menjadi alat ukur yang penting untuk menilai sejauh mana penerapan mekanisme pengawasan dan pengelolaan perusahaan dapat berdampak pada hasil keuangan. Mekanisme-mekanisme seperti keberadaan komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional diyakini mampu memengaruhi kualitas pengambilan keputusan manajerial yang pada gilirannya berdampak terhadap nilai laba dan efisiensi modal yang tercermin dalam ROE (Kusumawati & Rahardjo, 2020). Penelitian-penelitian terdahulu juga banyak menggunakan ROE sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat atau meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan ROE melalui peningkatan pengawasan terhadap kebijakan strategis dan pengelolaan risiko (Salsabila & Suhardjanto, 2021). Dengan demikian, penggunaan ROE dalam penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai seberapa besar pengaruh GCG terhadap pencapaian keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berlandaskan pada latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun kerangka konseptual mengenai pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional (variabel independen) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return on Equity atau ROE (variabel dependen), sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian
Sumber: olahan penulis

2.8 Perumusan Hipotesis

Komite audit adalah unit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan beranggotakan individu-individu yang berkompeten, termasuk anggota dewan dan pihak independen profesional. Fungsinya adalah untuk memberikan pengawasan atas pelaporan keuangan dan

pengendalian internal perusahaan secara independen. Komite ini memiliki peran penting dalam menjamin keakuratan informasi keuangan yang disampaikan manajemen, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan.

Berdasarkan *agency theory*, jumlah dan kualitas anggota komite audit yang memadai dapat mengurangi konflik keagenan dengan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajerial, termasuk efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan. Hal ini diyakini mampu meningkatkan Return on Equity (ROE) sebagai indikator utama profitabilitas berdasarkan modal sendiri. *Resource dependence theory* juga mendukung bahwa keberagaman keahlian dalam komite audit mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak dan mendukung efisiensi kinerja keuangan.

Hasil penelitian Adinegara & Herliansyah (2023) yang menggambarkan bahwa komite audit memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Rahmawati & Kitrianti (2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan Komisaris Independen merupakan individu dari luar organisasi perusahaan yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pihak internal, dan ditunjuk melalui mekanisme formal oleh RUPS. Dewan komisaris independen diangkat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak memiliki ikatan khusus terkait finansial, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Kehadiran komisaris independen diharapkan mampu menjaga independensi serta berperan sebagai penengah antara kepentingan pemilik dan kepentingan perusahaan. Mereka berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap keputusan direksi. Komisaris independen bertugas memastikan bahwa aktivitas perusahaan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai tata kelola yang baik serta strategi yang telah ditetapkan.

Keberadaan komisaris independen dalam proporsi yang cukup dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mencegah konflik kepentingan yang merugikan pemegang saham. Dengan meningkatnya kualitas pengawasan, maka efisiensi dalam pemanfaatan modal pun akan lebih optimal, yang berpotensi meningkatkan Return on Equity (ROE). Dalam konteks ini, ROE digunakan sebagai tolok ukur efektivitas perusahaan dalam mengelola dana pemegang saham untuk memperoleh laba.

Penelitian oleh Damanik & Purnamasari (2022) menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pernyataan ini didukung penelitian Herman Ruslim & Ieneke Santoso (2018) dan Setiawan & Setiadi (2020) memperkuat bahwa keberadaan dewan komisaris independen berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dari entitas profesional seperti dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, atau reksa dana. Pihak institusi biasanya memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukan analisis mendalam atas laporan keuangan dan strategi perusahaan. Oleh karena itu, mereka cenderung memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap perilaku manajerial, dan dapat mendorong perusahaan agar bertindak efisien dan akuntabel dalam penggunaan ekuitas. Dalam konteks ROE, peran pengawasan oleh pemilik institusional dinilai mampu mendorong manajemen untuk lebih bertanggung jawab dalam meningkatkan profitabilitas dari ekuitas yang ditanamkan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka potensi untuk meningkatkan ROE juga semakin tinggi, karena pengaruh eksternal terhadap manajemen semakin kuat.

Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Adi & Suwanti (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian oleh Nurdiwaty et al., (2019) juga menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Metode yang Diusulkan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berkaitan erat dengan data numerik dan pengolahan statistik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan explanatory research (penelitian penjelasan), yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen Good Corporate Governance (GCG) dengan variabel dependen kinerja keuangan bank. Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 hingga 2023. Data diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan yang diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing bank. Penelitian dilaksanakan pada periode Maret – Mei 2024, dimulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, hingga tahap akhir penyusunan laporan akhir proposal.

Teknik Pengambilan Sampel meliputi laporan tahunan perbankan pada periode 2021 – 2023. Metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang telah ditentukan sebelumnya, didapat 47 sampel dengan kriteria sebagai berikut dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 – 2023	47
Perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2021 – 2023	(1)
Perbankan yang mengalami kerugian pada tahun 2021 – 2023	(10)
Perbankan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian pada laporan tahunan tahun 2021 – 2023	(2)
Jumlah perbankan yang memenuhi kriteria sampel	34

Sumber : data diolah penulis, 2025

Tabel 1 memberikan penjelasan mengenai kriteria sampel penelitian dan menunjukkan bahwa terdapat 47 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 – 2023, terdapat 1 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangannya pada periode 2021 – 2023, terdapat 10 perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2021 – 2023, dan 2 perusahaan yang memiliki data yang tidak lengkap terkait variabel penelitian sehingga didapat 34 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi laporan tahunan serta laporan keuangan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 – 2023 (3 tahun) sehingga diperoleh 47 sampel penelitian.

Penelitian menggunakan dua variabel, yaitu variabel terikat (dependent variabel) dan variabel bebas (independent variable). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan (ROE), sedangkan variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Komite Audit (X₁), Dewan Komisaris Independen (X₂) dan Kepemilikan Institusional (X₃).

Tabel 2. Operasional Tabel

Nama Variabel	Alat Ukur	Skala
Kinerja Keuangan (ROE)	$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	Rasio
Komite Audit	$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Anggota Komite Audit}$	Nominal
Dewan Komisaris Independen	$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}} \times 100\%$	Rasio
Kepemilikan Institusional	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan saham institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak statistik SPSS versi 26 melalui beberapa tahapan uji statistik. Tahap pertama dilakukan uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan distribusi data normal; uji multikolinearitas yang mengandalkan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) guna mengidentifikasi potensi korelasi antar variabel independen; uji heteroskedastisitas untuk mendeteksi ketidakkonstanan varians residual; serta uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson guna mengamati kemungkinan adanya autokorelasi dalam residual. Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, analisis dilanjutkan dengan metode regresi linier berganda untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen (Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional) terhadap variabel dependen yaitu Return on Equity (ROE). Pengujian dilakukan secara parsial melalui uji t untuk melihat signifikansi masing-masing variabel independen, serta uji simultan melalui uji F guna menguji signifikansi model secara keseluruhan. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variabilitas ROE yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model. Hasil dari tahapan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Uji Asumsi Klasik

Penelitian terdahulu secara umum menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data residual pada model regresi terdistribusi normal, sehingga hasil pengujian statistik menjadi valid dan dapat dipercaya. Menurut Ghazali (2018), Uji normalitas adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya dalam model regresi memiliki distribusi data yang mendekati distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov dan dianalisis dengan melihat histogram dan normal probability plot.

Pada Tabel 3 Uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirov menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi tidak berbeda signifikan dari distribusi normal dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. = 0.200) yang lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa normalitas residual yang terpenuhi ini menunjukkan bahwa asumsi klasik regresi linear mengenai normalitas telah terpenuhi (data residual berdistribusi normal).

Tabel 3. Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	101
Mean	.0000000
Std. Deviation	.05334704
Absolute	.073
Positive	.073
Negative	-.053
Test Statistic	.073
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200^{c,d}

Sumber: data olahan SPSS 26, 2025

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara error pada periode t dengan error pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka hasil estimasi regresi menjadi tidak efisien karena pelanggaran asumsi klasik (Ghozali, 2018). Berdasarkan pada tabel 4. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 0.862 jauh di bawah angka 2, yang menunjukkan adanya autokorelasi positif dalam data residual model regresi. Artinya, residual satu observasi memiliki kecenderungan berkorelasi secara positif dengan residual observasi sebelumnya yang memungkinkan berpengaruh terhadap tingkat keakuratan model. Hal ini bertolak belakang dengan asumsi klasik regresi linear yang mengharuskan residual bersifat independen atau tidak saling berhubungan. Nilai R Square menunjukkan bahwa sekitar 19.6% variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model, dan nilai Adjusted R Square sebesar 0.171 menunjukkan kekuatan model setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen. Namun, keberadaan autokorelasi positif tetap menjadi perhatian yang harus diperbaiki.

Tabel 4. Uji Auto Korelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
.422^a	.196	.171	.05417	.862

Sumber: data olahan SPSS 26, 2025

Menurut Ghozali (2018), Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan

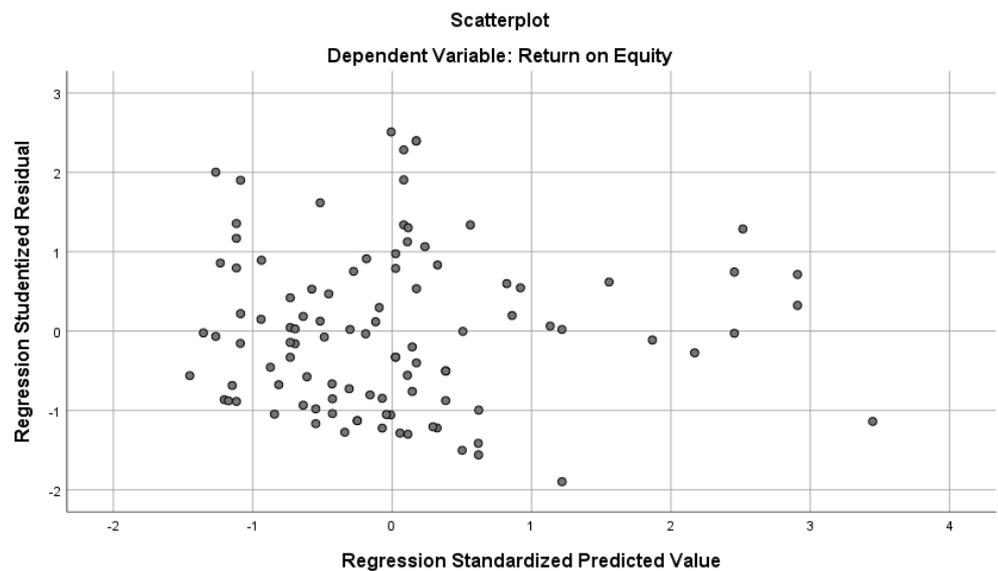
melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinieritas yang tinggi di antara variabel independen. Sebaliknya, jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, maka dianggap tidak ada masalah multikolinieritas yang signifikan.

Tabel 5. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Komite Audit (X ₁)	.996	1.004
Dewan Komisaris Independen (X ₂)	.984	1.016
Kepemilikan Institusional (X ₃)	.984	1.016

Sumber: data olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 5. Uji multikolonieritas yang menunjukkan bahwa variabel Komite Audit memiliki nilai Tolerance sebesar 0.996 dan nilai VIF sebesar 1.004. Nilai Tolerance yang mendekati 1 dan VIF yang mendekati 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas yang signifikan antara variabel Komite Audit dan variabel independen lainnya dalam model. Variabel Dewan Komisaris Independen menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0.984 dan VIF sebesar 1.016. Nilai ini juga masih jauh dari batas multikolinieritas. Ini menandakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak memiliki korelasi tinggi dengan variabel lain di dalam model. Variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0.984 dan VIF sebesar 1.016. Sama seperti dua variabel sebelumnya, nilai ini berada dalam kategori aman dan tidak mengindikasikan signifikansi multikolinieritas. Artinya, Kepemilikan Institusional memiliki hubungan yang independen dalam model dan tidak saling mempengaruhi model. Dengan demikian, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas yang signifikan antar variabel dalam model regresi ini. Artinya, pengaruh dari tiap variabel terhadap Return on Equity dapat dianalisis tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya.



Gambar 2. Grafik Scatterplot
 Sumber: olahan data SPSS 26, 2025

Berdasarkan pada Gambar 2. Grafik Scatterplot menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas menghasilkan sebaran titik scatterplot yang bersifat acak dan tidak menunjukkan pola tertentu dalam distribusinya, yang menandakan bahwa data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan.

4.2 Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan linier antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi apakah masing-masing variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan—baik secara positif maupun negatif—terhadap variabel dependen, serta seberapa besar kontribusi mereka dalam meramalkan perubahan nilai dari variabel dependen. Selain itu, pengujian model dilakukan secara menyeluruh menggunakan uji F (simultan) untuk menilai pengaruh kolektif semua variabel bebas, dan uji t (parsial) untuk mengevaluasi dampak masing-masing variabel secara parsial atau individual. (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Uji Hipotesis Parsial

Uji Hipotesis Parsial	Unstandarized		Standarized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
Komite Audit	.017	.004	.373	4.088	.000
Dewan Komisaris	.032	.055	.054	.587	.559
Independen					
Kepemilikan	-.079	.035	-.206	-	.027
Institusional				2.245	

Sumber: data olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ditampilkan pada Tabel 6, uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan perusahaan bervariasi. Untuk variabel Komite Audit (X1), diperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.017, dengan nilai $t = 4.088$ dan signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi < 0.05 , maka hasil ini menunjukkan bahwa semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komite Audit, maka Return on Equity (ROE) perusahaan juga akan meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Komite Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan ROE, maka H1 diterima. Hasil ini konsisten dengan temuan Addina et al., (2023) yang menyatakan bahwa komite audit memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemantauan atas laporan keuangan, pelaksanaan audit eksternal, serta kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Peran ini menjadikan keberadaan komite audit sebagai elemen memiliki peran krusial dalam mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan melalui pengelolaan ekuitas yang lebih efisien dan akuntabel. Tata kelola perusahaan yang efektif, termasuk keberadaan dan kualitas komite audit, dapat memperbaiki struktur pengambilan keputusan keuangan dan memperkuat sistem kontrol internal, yang berdampak positif pada peningkatan ROE perusahaan, terutama di sektor keuangan dan jasa (Reynaldi & Kuntadi, 2024). Namun temuan ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Aulia et al., (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity (ROE). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan di Indonesia, dan dijelaskan bahwa efektivitas komite audit seringkali terganggu oleh kurangnya independensi serta dominasi kepentingan internal.

Dewan Komisaris Independen (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.032, nilai $t = 0.587$, dan signifikansi sebesar 0.559. Karena nilai signifikansi > 0.05 , Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE). Nilai Beta sebesar 0.054 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap ROE sangat kecil dan tidak cukup kuat untuk menjelaskan variabilitas kinerja keuangan dalam model ini, maka H2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen, meskipun secara teori dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap direksi dan memastikan transparansi manajemen, belum tentu dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengangkatan komisaris independen yang tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan internal, hubungan afiliasi, atau hanya sekadar memenuhi persyaratan regulasi. Dengan demikian, fungsi pengawasan strategis yang idealnya dijalankan oleh dewan komisaris independen tidak terealisasi secara optimal, dan dampaknya terhadap peningkatan efisiensi modal (ROE) menjadi tidak signifikan. Temuan ini didukung oleh Aulia et al., (2024) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROE pada perusahaan perbankan. Mereka menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, komisaris independen tidak menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan hanya bertindak sebagai simbol tata kelola semata. Sebaliknya, temuan ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh positif komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Penelitian oleh Damanik & Purnamasari (2022) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen berkontribusi terhadap peningkatan ROE melalui penguatan sistem pengawasan internal dan independensi pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, penelitian oleh Ilma (2021) juga menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin kuat pengawasan terhadap kebijakan manajemen, yang pada akhirnya mampu meningkatkan ROE perusahaan. Dalam konteks ini, dewan komisaris independen tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penyeimbang yang objektif antara kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Kepemilikan Institusional (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.079, dengan nilai t sebesar -2.245 dan signifikansi sebesar 0.027. Karena nilai signifikansi < 0.05 , maka secara statistik variabel ini berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, namun arah pengaruhnya negatif, maka H3 diterima. Artinya, dalam konteks model ini, semakin besar porsi kepemilikan institusional, justru kinerja keuangan perusahaan (ROE) cenderung menurun. Nilai Beta sebesar -0.206 juga menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan bersifat moderat namun tetap mengarah negatif. Hasil ini menandakan bahwa meskipun secara teoritis kepemilikan institusional seharusnya memperkuat pengawasan terhadap manajemen dan mendorong efisiensi keputusan keuangan, dalam praktiknya tidak selalu demikian. Terutama jika pemegang saham institusi memiliki hubungan personal atau afiliasi strategis dengan manajemen, atau justru berperan pasif dalam pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, fungsi monitoring yang seharusnya menjadi peran utama kepemilikan institusional tidak dijalankan secara optimal, bahkan dapat berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang berdampak buruk pada efektivitas tata kelola perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fazila et al., (2024) yang menunjukkan bahwa tingginya proporsi kepemilikan institusional tidak menjamin efektivitas pengawasan terhadap kinerja direksi. Dalam beberapa kasus, institusi pemegang saham justru tidak aktif dalam pengambilan keputusan strategis, serta hanya mengejar kepentingan jangka pendek.

Namun demikian, temuan bertentangan dengan hasil yang ditemukan oleh Khoirunnisa & Karina (2021) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan, meskipun arah pengaruhnya justru negatif terhadap Return on Equity (ROE). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan bersifat kontekstual. Peran strategis institusi sebagai pemilik saham sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif, independensi pengawasan, dan integritas kepentingan yang diusung dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam model ini, efektivitas tersebut tampaknya belum terwujud secara optimal, sehingga pengaruhnya justru berdampak negatif terhadap Return on Equity (ROE).

Selanjutnya, uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE). Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 7.862 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, ketiga variabel independen dalam model, yaitu Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional, secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Tabel 7. Uji Hipotesis Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.069	3	.023	7.862	.000 ^b
Residual	.285	97	.003		
Total	.354	100			

Sumber: data olahan SPSS 26, 2025

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.442 ^a	.196	.171	.05417

Sumber: data olahan SPSS 26, 2025

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0.196 atau 19,6%. Artinya, variabel independen yang meliputi Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama mampu menjelaskan 19,6% variasi dalam kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan indikator tertentu Return on Equity (ROE). Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 80,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini dimasukkan dalam model regresi ini.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berperan signifikan dalam membentuk kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Secara empiris, keberadaan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Return on Equity (ROE), yang mengindikasikan bahwa pengawasan eksternal dan independensi struktur pengelolaan memiliki nilai strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan modal dan akuntabilitas manajerial. Di sisi lain, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa komite audit tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap sejauh mana efektivitas komite audit dalam menjalankan peran pengawasan internal di sektor perbankan. Temuan ini selaras dengan pendekatan teori keagenan yang menyoroti pentingnya penerapan mekanisme pengawasan guna meminimalkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Dalam konteks industri perbankan yang sangat diatur dan memiliki eksposur risiko sistemik yang tinggi, penerapan GCG bukan hanya sebagai kepatuhan formal,

tetapi sebagai kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan publik.

Dari temuan ini, dapat disarankan bahwa bank-bank di Indonesia perlu memperkuat fungsi dan independensi komite audit, baik dari sisi struktur keanggotaan, kompetensi profesional, maupun koordinasi lintas unit pengawasan, agar keberadaannya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas pengambilan keputusan keuangan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan proporsi dewan komisaris independen yang optimal, serta mendorong keterlibatan aktif pemegang saham institusional dalam pengawasan strategis guna memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas lainnya juga perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, agar prinsip GCG dapat dijalankan secara kontekstual dan efektif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti memperluas cakupan variabel independen dengan memasukkan dimensi lain dari GCG seperti transparansi informasi, komposisi dewan direksi, dan kualitas audit eksternal. Selain itu, analisis dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan mixed-method, yaitu mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif, guna menggali aspek implementatif dan budaya tata kelola di masing-masing lembaga keuangan secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat memfokuskan pada perbandingan antar sektor industri, atau meneliti dampak GCG dalam menghadapi krisis keuangan global, digitalisasi layanan perbankan, dan penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability governance) sebagai bagian dari agenda transformasi korporasi jangka panjang.

Daftar Pustaka

- [1] Shaker A Zahra and John A PearceII, "Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model," *J. Manage.*, vol. 15, no. 2, pp. 291–334, Jun. 1989, doi: 10.1177/014920638901500208.
- [2] F. Nugroho, "Korupsi Bank Jatim Cabang Jakarta Rp 569 M Berawal dari Hasil Pemeriksaan OJK dan SKAI," *Monit. Indones.*, 2025, [Online]. Available: https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/02/603490/korupsi-bank-jatim-cabang-jakarta-rp-569-m-berawal-dari-hasil-pemeriksaan-ojk-dan-skai?utm_source=chatgpt.com
- [3] C. Indra, W. Putra, J. P. Soehaditama, and M. Yusuf, "Fundamentals of Finance : Finance Management , Investment , Capital Market , and Funding," vol. 2, no. 1, 2024.
- [4] C. Indra, W. Putra, N. M. Machdar, and A. Haymans, "The Role of Organizational Culture , Market Competition , Mitigation Strategies and Information Systems on Risk Management," vol. 2, no. 3, pp. 367–382, 2024.
- [5] S. Krismaya, I. Ulum, T. Oktavendi, F. Afrizal, and F. Mawardi, "Good Corporate Governance (GCG) and Islamic Social Reporting (ISR): A bibliometric approach," *J. Account. Invest.*, vol. 25, pp. 568–583, May 2024, doi: 10.18196/jai.v25i2.19739.
- [6] P. Fazila, A. Hijriah, and Rusliyawati, "The Influence of Good Corporate Governance on the Financial Performance of Food and Beverage Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023," *J. Account. Financ. Manag.*, vol. 5, no. 4 SE-Articles, pp. 551–563, Sep. 2024, doi: 10.38035/jafm.v5i4.648.
- [7] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976, doi: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- [8] K. M. Eisenhardt, "Agency Theory: An Assessment and Review," *Acad. Manag. Rev.*, vol. 14, no. 1, pp. 57–74, May 1989, doi: 10.2307/258191.
- [9] E. F. Fama and M. C. Jensen, "Separation of ownership and control," *Corp. Gov. Values, Ethics Leadersh.*, pp. 163–188, 2019, doi: 10.1086/467037.
- [10] A. A. Alchian and H. Demsetz, "Production, Information Costs, and Economic Organization," *Am. Econ. Rev.*, vol. 62, no. 5, pp. 777–795, May 1972, [Online]. Available: <http://www.jstor.org/stable/1815199>
- [11] A. S. Yadav and I. S. Yadav, "Debt maturity, governance and investment efficiency: new evidence from emerging market," *Asian*

- Rev. Account.*, vol. 33, no. 1, pp. 132–162, Jan. 2025, doi: 10.1108/ARA-02-2024-0053.
- [12] M. Kartikasary, C. J. Leksana, and K. L. E. Putra, “Institutional Investment Effect to Investment Efficiency with External Audit Quality as Moderating Variable in Indonesia,” in *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 2024, pp. 289–295. doi: 10.1109/SIBF63788.2024.10883838.
- [13] G. T. Budotela, “Determinants of Non- Performing Loans Among Commercial Banks in Tanzania,” pp. 1–23, 2016.
- [14] X. Chang, “the Multifaceted Impact of Directors and Officers (D&O) Insurance on Corporate Governance and Performance,” *Asian Acad. Manag. J. Account. Financ.*, vol. 20, no. 1, pp. 1–39, 2024, doi: 10.21315/aamjaf2024.20.1.1.
- [15] L. M. A. Aladwey and A. Diab, “Business bribery, corruption and fraud: audit committee and external auditor’s attributes in GCC countries,” *J. Financ. Regul. Compliance*, vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, Jan. 2025, doi: 10.1108/JFRC-09-2024-0173.
- [16] FCGI, “Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan,” p. Jilid 1 Edisi 3, 2001.
- [17] World Bank, “Annual Report,” pp. 1–370, 1999.
- [18] S. Claessens and B. B. Yurtoglu, “Corporate governance in emerging markets: A survey,” *Emerg. Mark. Rev.*, vol. 15, pp. 1–33, 2013, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.002>.
- [19] OJK, “Roadmap Tata Kelola Perusahaan Perbankan Indonesia 2020–2024,” 2020, [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Tata-Kelola-Perbankan-Indonesia-2020-2024.aspx>
- [20] E. M. Al-Matari, A. K. Al-Swidi, and F. H. B. Fadzil, “Audit committee characteristics and executive committee characteristics and firm performance in Oman: Empirical study,” *Asian Soc. Sci.*, vol. 10, no. 12, pp. 98–113, 2014, doi: 10.5539/ass.v10n12p98.
- [21] R. W. Shleifer Andrei and Vishny, “Surveycorp.gov.Pdf,” *The Journal Of Finance*, vol. 52, no. 2. pp. 737–783, 1997.
- [22] T. Dwiridotjahjono, “Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia,” *J. Adm. Bisnis Unpar*, vol. 5, no. 2, pp. 101–112, 2009.
- [23] OJK, “ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TANJUNGBALAI - ASAHAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,” 2016.
- [24] KNKG, “PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDONESIA,” *Kom. Nas. Kebijak. Gov.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2006.
- [25] T. Dewayanto, R. Rahmawati, and D. Suhardjanto, “Institutional Ownership, Blockholder Ownership, and the Board’s Tenure to Disclosure of Corporate Governance,” *Ekuilibrium J. Ilm. Bid. Ilmu Ekon.*, vol. 15, no. 1, p. 83, 2020, doi: 10.24269/ekuilibrium.v15i1.2272.
- [26] G. R. Adinegara and Y. Herliansyah, “Pengaruh Penerapan GCG yang dinilai Menggunakan Corporate Governance Index, Kepemilikan Instiusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Pasar Perusahaan,” *Owner*, vol. 7, no. 3, pp. 2052–2061, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i3.1452.
- [27] A. Susanto, “Sustainability Report , Institutional Ownership , and Foreign Ownership on Financial Performance with Board of Commissioners as Moderating,” vol. 9, no. 1, pp. 108–123, 2024.
- [28] P. Linanda, D. Fenisa, G. Astriana, A. Sumaryanti, and H. Aryasa, “Pengaruh Good Corporate Governance, dan Institutional Ownership Terhadap Financial Distress Selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Akt. J. Account. Manag.*, vol. 2, no. 1 SE-Articles, Feb. 2024, doi: 10.24260/aktiva.v2i1.1836.
- [29] Kasmir, “Analisis Laporan Keuangan,” *Jakarta Raja Graf. Persada*, p. 386, 2018.
- [30] S. S. Harahap, “Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,” *Jakarta Rajawali Press*, 2016.
- [31] Hery, “Analisis Laporan Keuangan : Pendekatan Ratio Analysis untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan,” *Jakarta : Grasindo*, 2021.
- [32] Kusumawati and Rahardjo, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,” *J. Ilmu dan Ris.*

- Akunt.*, 2020.
- [33] Salsabila and Suhardjanto, "Good Corporate Governance dan Profitabilitas pada Perusahaan Non-Keuangan di Indonesia," *J. Akunt. dan Investasi*, vol. 125–138, 2021.
- [34] A. Ahmad, Z. Salleh, H. Hashim, and F. Sulong, "Corporate governance and firm performance: empirical evidence from Jordan," *J. Financ. Report. Account.*, Jun. 2021, doi: 10.1108/JFRA-12-2020-0361.
- [35] I. Rahmawati and P. Kitrianti, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN AGRIKULTUR SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2015-2019," *Prog. J. Pendidikan, Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 1 SE-Articles, Feb. 2021, doi: 10.47080/progress.v4i1.1099.
- [36] E. R. Damanik and A. Purnamasari, "Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi terhadap Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021)," *J. Intelekt.*, vol. 1, no. 1, pp. 23–34, 2022, doi: 10.61635/jin.v1i1.73.
- [37] Herman Ruslim and Ieneke Santoso, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Direktur, Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Manajemen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *J. Ekon.*, vol. 23, no. 3 SE-Articles, pp. 334–346, Nov. 2018, doi: 10.24912/je.v23i3.417.
- [38] O. Setiawan and I. Setiadi, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Barang Konsumsi di BEI," *Kompartemen J. Ilm. Akunt.*, vol. 18, no. 1 SE-Artikel, Mar. 2020, doi: 10.30595/kompartemen.v18i1.6606.
- [39] S. A. P. Adi and T. Suwarti, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Studi Empiris Pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016," *J. Ilm. Mbs. Akuntansi Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 13, no. 2, p. 585, 2022.
- [40] D. Nurdiwati, A. Puput, Zaman, and Badrus, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017)," *Semin. Nas.*, 2019.
- [41] I. Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25," vol. Semarang :, 2018.
- [42] C. Addina, H. Harmain, and R. Syahriza, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 11, no. 1 SE-Articles, pp. 89–100, Feb. 2023, doi: 10.37641/jiakes.v11i1.1616.
- [43] A. S. Reynaldi and C. Kuntadi, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Kinerja Perusahaan," *J. Penelit. Ilmu Ekon. dan Keuang. Syriah*, vol. 2, no. 2 SE-Articles, pp. 222–233, May 2024, doi: 10.59059/jupiekas.v2i2.1242.
- [44] A. F. Aulia, E. Kartini, and H. Khotmi, "Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021 PENDAHULUAN Setiap entitas sejatinya harus mampu menghasilkan laba dalam meningkatkan Kinerja Perusahaan . D," vol. 2, no. 4, pp. 213–226, 2024.
- [45] Y. Ilma, "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnalekonomi.unisla*, vol. 2, pp. 1–10, 2021, [Online]. Available: <https://www.jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/JEKMA/article/view/664>
- [46] Khoirunnisa & Karina, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019)," *Jurnal ilmu Akuntansi AkumNas*, vol. 19, no. 2. pp. 1–28, 2021.